

REPRESENTASI, PARODISASI, DAN KONTEKSTUALISASI TUJUH PULUHAN KARYA YANUSA NUGROHO: PENDEKATAN POSMODERNISME LINDA HUTCHEON

Yacub Fahmilda¹, Yustri Agung Prastiyono²

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Yacub.fahmilda@mail.ugm.ac.id¹, yustribb@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bangunan cerpen *Tujuh Puluhan* dari unsur peristiwa sejarah dan fiksi beserta fungsinya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kontekstualisasi cerpen *Tujuh Puluhan* yang berlatar waktu era Orde Baru. Cerpen karya Yanusa Nugroho tersebut terbit pada puncak aksi demonstrasi mahasiswa dipenghujung Kabinet Kerja bertugas. Terbitnya *Tujuh Puluhan* berlatar waktu era Orde Baru pada era Kabinet Kerja menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana bangunan fakta sejarah dan fiksi dalam *Tujuh Puluhan* beserta fungsinya. Kedua, bagaimana kontekstualisasi peristiwa nasional era Orde Baru pada era Kabinet Kerja beserta kritik pengarang melalui karya sastra. Untuk mengurai pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data pada penelitian ini berupa kutipan-kutipan cerpen *Tujuh Puluhan*. Pengumpulan data tersebut didukung dengan melakukan studi pustaka sebagai penunjang analisis. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan pendekatan posmodernisme Linda Hutcheon. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa cerpen *Tujuh Puluhan* dibangun berdasarkan fakta sejarah Orde Baru dan fiksi. Parodisasi tokoh pedagang buah dan petugas keamanan yang menjadi narasi pusat digunakan untuk menyembunyikan gagasan pengarang berupa kritik sosial. Secara kontekstual, cerpen *Tujuh Puluhan* mengaitkan peristiwa-peristiwa Orde Baru dengan Kabinet Kerja memimpin pemerintahan. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah pelemahan KPK, keberpihakan pemodal asing, dan dominasi penguasa oleh aparat pada masa transisi Kabinet Kerja dengan Kabinet Indonesia Maju.

Kata Kunci: Representasi; Parodisasi; Kontekstualisasi; Posmodernisme; Linda Hutcheon

PENDAHULUAN

Cerpen *Tujuh Puluhan* terbit pada saat mahasiswa mulai kembali menyuarakan keresahannya pada pemerintah. Cerpen karya Yanusa Nugroho tersebut terbit pada kolom hiburan koran Kompas seminggu setelah aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR. Rangkaian demonstrasi yang terjadi selama 2019 oleh mahasiswa mencapai puncaknya pada akhir September. Demonstrasi yang digagas oleh mahasiswa tersebut mengundang berbagai kalangan luas, seperti sipil, seniman, aktris, dan pelajar Jakarta. Aksi tersebut menuntut pemerintah agar tidak mengesahkan undang-undang yang dianggap kontroversial. Hal tersebut disebabkan rancangan undang-undang tersebut dianggap memuat pasal-pasal yang bermasalah sehingga perlu adanya peninjauan ulang. Aksi demonstrasi dipenghujung pemerintahan presiden Joko Widodo ini merupakan kebangkitan aksi mahasiswa setelah 20 tahun reformasi. Hal tersebut disebabkan mahasiswa sudah merasa cukup bahkan tenang-tenang saja karena telah berhasil menurunkan presiden Soeharto.

Berita *online* tribunnews.com mencatat, rangkaian aksi demonstrasi telah dilaksanakan di sejumlah kota seperti, Jakarta, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Kalimantan, dan Surakarta selama September. Aksi di berbagai wilayah tersebut merupakan bentuk mosi tidak percaya rakyat yang digagas oleh mahasiswa terhadap RUU yang bermasalah. Permasalahan pada RUU tersebut antara lain adalah posisi KPK yang dilemahkan oleh pihak pemerintah sendiri. Pelemahan tersebut berupa pembentukan Dewan Pengawas yang terdiri dari lima orang. Mereka ditunjuk oleh pemerintah dengan melaksanakan tugas-tugas yang belum ada di pemerintahan sebelumnya. Tugas tersebut berupa penyadapan, penyelidikan, dan pengusutan kasus harus disetujui oleh Dewan Pengawas. Artinya, pemerintah berhak membatasi ruang gerak KPK dalam mengusut kasus-kasus korupsi. Dalam hal ini, aksi mahasiswa merupakan gerakan moral berpihak pada rakyat yang dirugikan.

Sehubungan dengan kondisi di atas, terbitnya cerpen *Tujuh Puluhan* di masa 20 tahun setelah reformasi menimbulkan pertanyaan besar. Indonesia pada tahun 1970-an dipimpin oleh Soeharto yang militeris dan otoriter. Pada tahun 2019, Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo yang memiliki latar belakang berbeda dengan Soeharto. Soeharto sebagai presiden yang berlatar belakang militer berbanding terbalik dengan presiden Joko Widodo yang berlatar belakang sipil. Terlebih lagi, presiden Joko Widodo yang terpilih dua kali dikenal sebagai presiden yang dekat dengan sipil. Kedekatan tersebut memberikan kepercayaan bahwa ia berpihak pada rakyat sipil. Akan tetapi, Yanusa Nugraha menerbitkan cerpennya dengan judul yang mengacu pada situasi dan kondisi rezim Soeharto. Berkaitan dengan cerpen *Tujuh Puluhan*, latar peristiwa yang merujuk pemerintahan Soeharto dalam cerpen ini perlu dimaknai ulang pada konteks kepemimpinan presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, peristiwa sejarah sebagai ingatan kolektif pengarang memiliki peranan dalam membangun sebuah cerita fiksi. Meskipun cerpen sebagai karya sastra merupakan hasil dari proses imajinasi kreatif, ia tak terlepas dari kenyataan empiris. Artinya, penulisan cerpen tersebut merupakan pantulan kisah pengalaman hidup sosial pengarang (Abdullah, 1984:503).

Cerpen *Tujuh Puluhan* mengambil latar waktu pada masa pemerintahan Soeharto berkuasa. Pada zaman tahun 1970-an, banyak peristiwa sejarah nasional oleh mahasiswa yang menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Soeharto. Pada awal 1970-an, sejumlah aksi demonstrasi oleh mahasiswa berlangsung secara regional, seperti di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Hingga puncak aksi demonstrasi tersebut pada 15 Januari 1973. Puncak aksi demonstrasi tersebut disebut sebagai tragedi Malapetaka 15 Januari 1973 (atau Malari). Peristiwa *rame-rame* yang disebut tokoh Ahmad Sodik dalam cerpen *Tujuh Puluhan* merupakan demonstrasi beberapa bulan setelah 15 Januari. Akibat adanya peristiwa *rame-rame* tersebut Ahmad Sodik ditangkap oleh petugas keamanan. Sebagai tokoh utama, Ahmad Sodik seorang penjual buah diduga terlibat dalam aksi demonstrasi. Dalam pembacaan cerpen ini, perlu adanya pendekatan yang dapat melihat dari dua sisi sekaligus, yaitu struktur dan isinya serta aspek konteks (sosial, sejarah, dan politik) karya sastra tersebut dilahirkan. Pendekatan demikian, menurut Hutcheon (via Supriyadi, 2016: 130) merupakan karya sastra posmodernisme atau fiksi posmodernisme. Pendekatan posmodernisme ini menggiring pembaca untuk menentukan kerangka ideologis secara kritis. Gerak ideologis tersebut mempertanyakan suatu kekuatan yang dianggap mapan, pasti, tidak terbantahkan, dan menjadi pusat. Gerak kritis tersebut menggoyahkan kekuatan, kemapanan, dan menarik pinggir

menuju pusat. Dalam hal ini, perlu adanya pemaknaan ulang terkait latar peristiwa dan tokoh dalam *Tujuh Puluhan* dengan pendekatan kritis, bukan nostalgis.

Menurut Supriyadi (2016:131), pendekatan posmodernisme Hutcheon pada karya sastra dirumuskan menjadi empat fokus utama, yaitu; (1) Penggunaan dan penyimpangan teks-teks pembangun karya sastra atau parodis. Teks sebelumnya digunakan, dibangun, lalu disimpangi untuk menyampaikan gagasan pengarang bukan menceritakan kembali peristiwa masa lalu; (2) Ketegangan pusat dan pinggiran sebagai bentuk dekonstruksi (dipertanyakan dan dipersaingkan) agar kehadiran pinggiran diakui; (3) Kontekstualisasi kelahiran karya sastra dengan memperhatikan aspek sosial, historis, dan politik. Kontekstualisasi tersebut tidak merekonstruksi peristiwa masa lalu yang nostalgis, tapi mengkritisi kondisi masyarakat pada saat itu. (4) Kehadiran pengarang dalam karya sastra ditandai pada sudut pandang pengisahan, suara-suara narator, dan tokoh-tokoh sebagai bagian masyarakat ketika karya itu diciptakan.

Hutcheon (2004: 83) menjelaskan bahwa fiksi posmodern tidak dapat menghindari representasi yang selalu bertolak antara sejarah dan fiksi (atau dunia dan seni). Representasi dari berbagai sisi dapat ditarik menjadi narasi utama untuk memahami dan mengonstruksi cerita sebagai sarana. Ahmad Sodik seorang penjual buah sebagai tokoh utama tidak berkaitan langsung dengan peristiwa *rame-rame* yang terjadi dalam cerpen. Begitu pula petugas keamanan sebagai tokoh sampingan yang menginterogasi Ahmad Sodik. Kedua tokoh tersebut tidak berkaitan langsung dengan peristiwa Malari. Akan tetapi, terdapat hubungan antara cerita dan citra dengan tokoh utama dan sampingan yang merujuk pada permasalahan-permasalahan masa Orde Baru. Selain peristiwa Malari, *Tujuh Puluhan* juga merepresentasikan peristiwa dan hal-hal terkait pada masa Orde Baru. Hal tersebut disebabkan segala sisi sejarah dapat dipertanyakan dan dijungkirbalikkan dalam fiksi posmodern yang parodis. Segala representasi menggugat konvensionalitas beserta ideologi yang tidak diakui dalam tatanan kebudayaan kita yang khas. Artinya, identitas diri cerpen tersebut dibangun, disimpangi, lalu dinarasikan ulang sebagai bentuk parodisasi.

Karya sastra posmodernisme yang bertolak pada sejarah menghadapi ketegangan antara fakta dan fiksi dalam penulisan. Ketegangan tersebut hanyalah perbedaan pemanfaatan fakta dan data. Penulisan sejarah berusaha menyampaikan fakta sejarah seobjektif mungkin sedangkan karya sastra sejarah melibatkan proses imajinasi pengarang. Pelibatan proses imajinasi tersebut merupakan bentuk penyimpangan peristiwa sejarah guna menyampaikan gagasan yang estetik (Supriyadi, 2016:132). Artinya, cerpen *Tujuh Puluhan* juga disebut sebagai karya sastra sejarah karena mengandung unsur-unsur sejarah. Abdullah (1984: 503) mengungkapkan pula bahwa penulisan karya sastra yang mengandung unsur sejarah merupakan sumber sejarah yang buruk. Hal tersebut disebabkan karya sastra sejarah tidak dapat menjawab pertanyaan elementer seperti, apa, siapa, di mana. Akan tetapi, karya sastra dapat menjadi referensi suatu realitas. Dalam hal ini, sastra sejarah berbeda dengan penulisan sejarah yang meniadakan proses imajinatif dalam penyusunannya.

Meskipun cerpen *Tujuh Puluhan* berlatar waktu Orde Baru, representasi dan pemanfaatan unsur sejarahnya perlu dikontekstualisasikan. Hal tersebut disebabkan cerpen ini tidak menuliskan ulang peristiwa pada 1970-an, tetapi mengkritisi peristiwa pada 'masa lalu' dan menempatkannya pada 'masa kini'. Terlebih lagi, kelahiran cerpen *Tujuh Puluhan* tidak

lepas dari waktu dan peristiwa yang melatarbelakangi penerbitannya. Penulisan cerpen pada masa kini dengan mengambil sisi sudut lain sejarah perlu adanya pemaknaan baru. Pemaknaan baru tersebut merupakan gagasan atau inti pemanfaatan unsur sejarah dalam membangun cerita. Menurut pernyataan Yunus (1984: 510 - 511), kontekstualisasi penulisan sejarah dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, hubungan sejarah tersebut dengan 'masa kini'. Kedua, tanggapan terhadap peristiwa sejarah tersebut. Kontekstualisasi sebagai bentuk penilaian terhadap masa lampau tidak pula dilepaskan dari kepentingan 'masa kini' dan ideologi. Dengan demikian, kontekstualisasi cerpen ini berupa tanggapan pengarang terhadap peristiwa 'masa lalu' dan hubungannya dengan 'masa kini'.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan menginterpretasi *Tujuh Puluhan* sebagai fiksi posmodern dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana bangunan fakta sejarah dan fiksi dalam *Tujuh Puluhan* beserta fungsinya. Kedua, bagaimana kontekstualisasi peristiwa pada rezim Kabinet Kerja dalam *Tujuh Puluhan* beserta kritik pengarang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan data kemudian dijabarkan melalui analisis (Ratna, 2004:53). Data yang didapat berupa kutipan yang terdapat pada cerpen *Tujuh Puluhan* karya Yanusa Nugroho dan dianalisis menggunakan pendekatan posmodernisme Linda Hutcheon. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan cerpen *Tujuh Puluhan* sebagai objek material. Kedua, menentukan pendekatan teori posmodernisme Linda Hutcheon sebagai objek formal untuk menganalisis. Ketiga, melakukan pembacaan berulang dan mendalam terhadap objek material. Keempat, menyusun rumusan masalah sebagai permasalahan yang akan diteliti. Kelima, menganalisis bangunan fakta sejarah dan fiksi, penyimpangan fakta sejarah, dan kontekstualisasi peristiwa pada rezim Kabinet Kerja.

PEMBAHASAN

Fakta dan Fiksi *Tujuh Puluhan*

Cerpen *Tujuh Puluhan* berlatar belakang waktu pada Orde Baru berkuasa terdapat beberapa peristiwa sejarah nasional yang fenomenal. Salah satu peristiwa sejarah tersebut adalah tragedi Malapetaka 15 Januari 1974 (atau Malari). Menurut Arif Budiman (via Ipong, 2013: 12) gerakan tersebut merupakan *moral force* (gerakan moral) berdasarkan kepedulian untuk menggapai cita-cita negara. Hal tersebut dipilih sebagai bentuk kesadaran bersama bahwa *political force* (gerakan politik) tidak akan memberikan dampak persatuan. Pengotakan politik pada zaman tersebut didasari represivitas presiden dan militer.

Laki-laki itu mulai gelisah, di manakah KTP-nya? Ah, jangan-jangan dibawa setan belang itu? Laki-laki itu kian gelisah dan putus asa. Sebentar lagi memang fajar, matahari akan bersinar dan hari akan berganti. Tetapi, tanpa KTP, dia akan menghadapi hari-hari yang kian tak menentu. Beberapa bulan yang lalu, penangkapan begitu banyak anak muda terjadi, menyusul tragedi lima belas Januari; yang sama sekali tak dipahami Ahmad Sodik si penjual buah. Dan KTP menjadi pelindung begitu banyak orang. (Kompas, 2019)

KTP sebagai identitas utama warga Indonesia menjadi barang penting untuk perlindungan. Ahmad Sodik sebagai pedagang buah tidak tahu terkait peristiwa Malari meskipun ia ada di masa itu. Ketidaktahuan tersebut merupakan pertanyaan kritis pengarang, bahwa aksi demonstrasi tersebut dimiliki oleh banyak pihak berkepentingan. Yaitu bukan sebatas pada tuntutan Malari. Demonstrasi yang didasari gerakan moral hanya dieksekusi oleh beberapa kampus saja. Sedikitnya massa dan tekanan politik pada saat itu membungkam aksi mahasiswa hingga kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka untuk merundingkan kerja sama antarnegara. Perbincangan tersebut mengarah pada pembahasaan masuknya investor sebagai modal asing. Sementara itu, kondisi perekonomian pada saat itu sangat tidak stabil sehingga dikhawatirkan menambah beban hutang negara (Ipong, 2013: 13). Ahmad Sodik menyoroti Malari dari sisi sejarah yang lain.

Menjelang Malari, pada tanggal 14 Januari 1974 sudah berdemonstrasi di lapangan udara Halim Perdanakusuma. Aksi tersebut merupakan protes terhadap kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Isu-isu yang ditonjolkan sebagai keresahan masyarakat adalah anti cukong dan modal asing terutama dari Jepang (Ipong, 2013: 23-24). Menurut Padiatra (2015:111), Asisten Pribadi (Aspri) Presiden turut andil sebagai penyebab terjadinya Malari. Aspri Presiden diduga menjadi dalang datangnya modal asing, terutama Jepang. Sikap politik-ekonomi Aspri Presiden tersebut bahkan dinilai menjerumuskan Indonesia agar ketergantungan pada Jepang. Inti dari gerakan Malari pada 1974 tersebut merupakan permasalahan politik-ekonomi yang terjadi pula pada Kabinet Kerja. Terbitnya *Tujuh Puluhan* pada bulan Oktober, merepresentasikan media pers dari September-Oktober 1973 yang menyorot penanaman modal asing Jepang merugikan Indonesia pada masa Soeharto (Padiatra, 2015:116). Artinya, cerpen tersebut mengkritisi kebijakan politik ekonomi Kabinet Kerja yang mirip pada masa Soeharto yang pro investor asing.

Petugas menyangsikan tanggal lahir Ahamad Sodik yang seakan-akan kelahirannya tidak wajar. Tanggal lahirnya dengan tanggal terbitnya keputusan Surat Sebelas Maret merupakan kelahiran yang ganjil. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno didatangi oleh tiga jenderal yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M, Jusuf di Istana Bogor. Ketiga jenderal tersebut berdiskusi bersama Presiden Soekarno terkait pemberontakan yang terjadi, saat Sidang Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan berlangsung. Hasil diskusi sore itu berupa Surat Sebelas Maret, yang disingkat Supersemar diterbitkan. Surat tugas tersebut ditujukan kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan dan menjaga wibawa presiden. Pengamanan dan penjagaan tersebut segera dilaksanakan oleh Soeharto dengan membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri. Semenjak adanya Supersemar itu, Indonesia mengalami perubahan orientasi kebijakan politik. Pengarang menggunakan istilah *tanggal lahir* sebagai kritik kelahiran Supersemar yang dibuat-buat dan terencana rapi oleh penguasa.

"Lahir?"/ "Sebelas Maret satu sembilan empat satu, Pak."

"Kok, aneh?"/ "....." (Ahamad Sodik terdiam).

"Saya tanya, kok aneh?"/ "Apanya, Pak?"

"Tanggal lahirmu?"/ "Kenapa, Pak?"

"Kenapa sebelas Maret? Kenapa tidak dua belas, atau tiga belas?" (Kompas, 2019)

Posisi Soeharto menjadi presiden mengubah perpolitikan dari sipil ke militer, berorientasi kiri menjadi kanan, dan dari anti nekolim menjadi pro investor asing. Selain itu, disahkannya Supersemar sebagai Ketetapan MPRS pada 1967 menjadi alat melegitimasi kekuasaan pemerintah yang otoriter selama 32 tahun (Bernas, 2014). *Tanggal lahir* tidak merujuk pada 'kelahiran tokoh', akan tetapi sebagai tanda lahirnya otoritaritas dan militeris Orde Baru.

Introgasi dalam cerpen tersebut, petugas melakukan tindak penekanan dan penindasan terhadap Ahmad Sodik. Tindakan ini merupakan bentuk pengkhianatan oleh pemerintah dan aparaturnya terhadap sipil. Ahmad Sodik merupakan pedagang kecil yang disimbolkan sebagai rakyat yang mendukung pemimpin pro *wong ciik* dan seharusnya mendapatkan perlindungan. Hal tersebut merepresentasikan kondisi perekonomian 70'an oleh Soeharto yang lebih mengutamakan kelompok elite dan investor asing daripada pemberdayaan ekonomi mandiri. Representasi kondisi masa Orde Baru dalam *Tujuh Puluhan* menjadi kritik Kabinet Kerja. Pengarang membangun 'kesamaan peristiwa' lalu memposisikan peristiwa tersebut sesuai kebutuhan 'masa kini'. Konstruksi peristiwa Malari sebagai tolak modal asing diposisikan pada aksi Tolak RUU KPK sebagai tolak pelemahan lembaga pemberantas korupsi. Penolakan pelemahan tersebut dikhawatirkan oleh investor-investor asing yang *kong-kali-kong* dengan pejabat sehingga lebih mudah untuk korupsi. Dengan kata lain, pemerintah telah menjinakkan KPK untuk mempermudah gerak mereka.

"Alamat rumah?"/ "Kampung Sawah, RT 03 RW 011, nomor 43."

"Di sini ditulis nomor 45." / "Salah ketik, Pak."

"Siapa yang ngetik?"/ "Kelurahan, Pak."

"Kenapa tidak protes?"/ "Sudah."

"Buktinya masih salah." / "Kelurahan, kan, selalu begitu."

"Jangan menyalahkan orang lain, kalau kamu protes, kan diperbaiki."

"Sudah, Pak. Tapi tetap saja salah." (Kompas, 2019)

Penindasan pejabat birokrat pada masa Soeharto sangat berlapis. Tidak hanya pada tataran pemerintah pusat, namun dari tingkat kelurahan. Maraknya pungutan liar (*pugli*) dalam birokrasi dan kerasnya perilaku petugas menjadi hal wajar pada Orde Baru. Fiksi posmodernisme mentransformasi dan merekam tulisan sebagai representasi yang artinya perubahan, baik citra maupun bahasa, dan memiliki politik (Hutcheon, 2004: 114). Karya sastra secara harfiah menunjukkan jejak-jejak paratekstual sejarah, wacana, dokumen, dan representasi naratisasinya.

Penyimpangan Fakta Sejarah

Aksi Malari merupakan tonggak awal demonstrasi mahasiswa pada masa Orde Baru. Mahasiswa tidak merasakan keresahan atas penguasa bahkan cenderung tenang-tenang saja. Ketenangan tersebut merupakan keberhasilan gerakan mahasiswa pada 1968 atau 1969 yang berhasil meruntuhkan kekuasaan Soekarno dan diangkatnya Soeharto menjadi presiden (Ipong, 2013:11). Namun, seiring pemerintahan Soeharto berjalan, tindakan represif Soeharto justru memantik kebangkitan aksi besar mahasiswa pada 15 Januari tersebut. Tragedi Malari ditulis oleh pengarang sebagai *peristiwa 'rame-rame'*. Artinya, pengarang memposisikan diri sebagai tokoh Ahmad Sodik yang tidak paham dengan peristiwa besar

politik. Ia adalah saksi berlangsungnya demo. Akan tetapi, pengarang menolak konvensionalitas, bahwa peristiwa tersebut tidak merujuk pada Malari. Bahkan, tragedi yang dianggap semua orang tahu justru dipertanyakan ulang. Akan tetapi, dapat dikatakan pula *peristiwa 'rame-rame'* memanglah perayaan bagi penguasa melancarkan pelemahan lembaga. Pernyataan tersebut merupakan ironi dibalik tragedi Malari.

Jalanan masih sepi. Apalagi setelah peristiwa 'rame-rame' itu. Peristiwa itu, di bulan Januari itu, sudah beberapa bulan berlalu, masih di tahun yang sama, tapi laki-laki itu masih saja was-was ketika bertemu petugas. (Kompas, 2019)

Sebelum peristiwa Malari terdapat rangkaian demo pada masa Orde Baru, permasalahan politik, pendidikan, inflasi, terutama korupsi menjadi perhatian penuh bagi mahasiswa. Peristiwa tersebut berlangsung pada *sudah beberapa bulan berlalu, masih di tahun yang sama*. Aksi 'rame-rame' tersebut beberapa bulan pasca Malari. Merajalelanya korupsi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi mendorong mahasiswa untuk membentuk gerakan. Gerakan yang diinisiasi oleh aktivis Victor D, Arief Budiman, Syahrir, dan Julius Uslam yaitu "Mahasiswa Menggugat". Narasi utama dalam aksi-aksi gerakan mahasiswa tersebut fokus pada tuntutan praktik korupsi. Ketika protes memasuki bulan Juli 1970, dibentuklah Komite Anti Korupsi (KAK). Komite tersebut secara organik diinisiasi oleh Arief Budiman, Syahrir, Marsilam Simanjuntak (Ipong, 2013:16). Tindak lanjut Malari berupa pembentukan KAK pada Orde Baru merupakan penyimpangan 'realitas' bahwa KPK justru dilemahkan dan dibatasi ruang geraknya pada Kabinet Kerja.

Investor yang dimaksud pada Kabinet Kerja bukanlah Jepang pada Orde Baru, melainkan Tiongkok dengan mega proyek ekonominya. Yaitu, *One-Belt-One-Road (OBOR)* sekaligus menjadi program diplomasi ekonomi utama Tiongkok. Mega proyek konektivitas yang ambisius tersebut digagas oleh Presiden Xi Jinping (Wibawati dkk., 2018:110). Melalui pembangunan infrastruktur dan jalur transportasi yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia, Eropa, dan Afrika menarik Kabinet Kerja untuk bergabung karena sejalan dengan visi. Visi tersebut adalah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Penawaran OBOR yang menggiurkan tersebut, memengaruhi kebijakan ekonomi dan politik selama Kabinet Kerja berkuasa.

Menurut Hutcheon (2004:147) parodisasi sebagai fenomena ironis atau daur ulang dengan penyimpangan-penyipangan citra 'masa lalu' yang menggambarkan sejarah sebagai representasi diparodisasikan. Pengulangan parodis 'masa lalu' tidak bersifat nostalgis, tapi selalu kritis. Representasi hari ini berasal dari 'masa lalu' merupakan konsekuensi ideologis yang tidak menjadikan perulangan ahistoris. Selain penyimpangan fakta sejarah dari pembentukan KAK menjadi pelemahan KPK dan rangkaian demo 70'an menjadi *peristiwa 'rame-rame'*, latar belakang tokoh penjual budah dan petugas merupakan bentuk penyimpangan pula. *Petugas* merupakan siapapun dan bukan aparat TNI karena menolak 'daur ulang' pada Orde Baru. *Petugas* memanglah yang mendapat tugas untuk mengintrogasi, menindas, dan menganiaya Ahmad Sodik. Ia digambarkan sebagai pedagang yang kalah oleh dominasi kekuasaan pemerintah.

"Pekerjaan?" / "Kan, ada di situ?"

"Saya tanya sama kamu, bukan mau membaca yang tertulis di sini"/ "Hm, saya penjual buah."

"Tapi di sini ditulis pedagang." / "Lantas apa bedanya? Saya penjual buah, di Blok A."

"Beda. Penjual buah, itu tertentu. Pedagang,... bisa dagang apa saja. Ya, kan?"
(Kompas,2019)

Tokoh *petugas* dan *pedagang* dalam peristiwa Malari merupakan peran pinggiran yang terlibat namun bukan menjadi pusat. Artinya, aksi Malari diperankan oleh *TNI* dan *mahasiswa*. Akan tetapi, korban kebijakan tersebut sama-sama seorang pelaku ekonomi kecil yang belum siap berkompetisi di pasar bebas. *Petugas* yang menertibkan Malari adalah *TNI* di bawah kendali Soeharto. Sementara itu, *polisi* menertibkan Aksi Tolak RUU KPK pada Kabinet Kerja.

Hutcheon (2004:75) menegaskan bahwa representasi yang tertulis dalam karya sastra secara historiografi tidak sepenuhnya diketahui oleh pembaca terkait cerita rekaan, kisah nyata, atau sesuatu yang dianggap benar. Ketercampuran representasi dalam karya sastra mengaburkan peristiwa sejarah. Pengaburan tersebut merupakan penyimpangan posmodern terhadap konvensi narasi yang dimanfaatkan pengarang untuk penyusunan alur cerita. Penyusunan alur cerita semacam itu, merupakan parodisasi yang mengacu pada zaman tertentu untuk mengontekstualisasikan zaman cerita tersebut terbit. Dalam hal ini, peristiwa sejarah yang menjadi latar belakang peristiwa diparodisasikan agar dapat menyesuaikan dengan masa karya tersebut diterbitkan.

Kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia menjadi puncak kerusuhan Malari. Kerusuhan mengacu pada pemodal asing yang dominan dan dikhawatirkan menambah utang negara. Malari diyakini pemodal dari Jepang, namun teks ini merujuk pada kebijakan OBOR yang digencarkan oleh Kabinet Kerja. Indonesia akan menjadi poros Maritim Dunia karena berkerja sama dengan Tiongkok. Hal tersebut disebabkan tawaran dari Tiongkok yang berambisi dalam menguasai bidang ekonomi baik darat maupun laut. Tol laut yang sedang dibangun dan beberapa sudah beroperasi membanjiri masuknya barang impor dari Tiongkok ke Indonesia. Bantuan utama yang didapat oleh Indonesia adalah modal infrastruktur dan paket kerja sama. Hal tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan pengangguran dan utang negara serta pelemahan pelaku ekonomi.

Rezim Kabinet Kerja dalam Tujuh Puluhan

Sastra menjadi salah satu cara pengarang menyampaikan dan melukiskan suatu pandangan ideologis secara estetik (Abdullah, 1984: 502). Pandangan ekspresif tersebut disampaikan pada publik secara simbolis dan pembaca bebas memaknainya sesuai tingkat apresiasi seninya. Karena sifatnya yang simbolis, kepastian peristiwa sejarah dalam bentuk karya sastra selalu problematis. Pemaknaan akan senantiasa bergerak seiring bertambahnya sudut pandang dan luasnya wawasan.

Jika penulisan latar peristiwa yang membicarakan Soeharto pada Orde Baru, artinya cerpen ini berbicara tentang masa 'kekuasaan di masa lalu'. Itulah yang dikatakan Yunus (1984:509) bahwa masa lampau adalah posisi pembicara dan suatu peristiwa didudukkan.

Sementara itu, cerpen *Tujuh Puluhan* tidak sebatas menceritakan ulang masa Orde Baru. Akan tetapi, kehadirannya mempertanyakan ulang atas militeris dan otoriternya Soeharto dibanding dengan Kabinet Kerja berkuasa. Keduanya memiliki latar belakang yang berbeda, tapi pada ujung kekuasaannya memiliki arah kebijakan ekonomi yang sama, yaitu berpihak pada pemodal asing.

Pemerintah Orde Baru selalu merayakan penumpasan PKI pada bulan September. Pada September 2019 diperingati penghujung masa Kabinet Kerja berkuasa. Kekuasaan dirayakan dengan aksi demonstrasi oleh mahasiswa. Bahwa pemimpin sipil yang otoriter juga mengulangi dominasi kekuasaan pemimpin militer. Kedua latar belakang tersebut berpihak pada pemodal asing.

Malam merambat menjelang fajar. Laki-laki itu masih saja duduk di kelamnya aspal. Embun membasahi aspal hitam, seakan memberikan sedikit kesejukan di kemarau September. Tubuhnya lelah. Jiwanya lelah. Lambungnya perih. Bibirnya perih. Matanya berdarah, mulutnya berdarah. Uangnya, entah raib kemana, dia tak tahu. KTP? (Kompas, 2019)

Adanya visi besar yang sama antara Presiden Xi Jinping dengan Jokowi, keduanya menjalin hubungan yang mutualisme. Khusus Indonesia, Tiongkok mendanai proyek infrastruktur hingga 90% dari total biaya. Meskipun penawaran investasi OBOR sangat membantu mendukung visi Jokowi, tantangan besar dari internal pun menanti. Ellis (*via* Wibawati dkk., 2018:115) mengatakan bahwa bentuk kerja sama yang ditawarkan oleh Tiongkok berbentuk *Turnkey Project Management*, yaitu investasi sistem satu paket. Melalui bentuk kerja sama tersebut, proyek-proyek dirancang, dijalankan, dan dibangun menggunakan material, teknologi, dan tenaga kerja Tiongkok. Hal yang memprihatinkan adalah jutaan tenaga ahli baik legal, maupun illegal dari Tiongkok. Dalam hal ini, Indonesia akan dibanjiri produk impor dan tenaga kerja asing asal Tiongkok. OBOR menjadi sarana dominasi ekonomi dan melindungi kepentingannya melalui negara-negara terdekat. Meskipun berlatar belakang sipil, tapi otoritas dan keberpihakan yang setara dengan militer. Menggerakkan aparat dan bergantung pada pemodal asing, yaitu Tiongkok yang berideologi komunisme atau sosialisme. Akan tetapi, menggunakan sistem perekonomian liberal.

Aksi Tolak RUU KPK pada akhir September tersebut merupakan puncak dari rangkaian aksi terkait RUU kontroversial. Banyaknya RUU yang bermasalah, pemerintah terburu-buru untuk mengesahkannya. Kondisi tersebut didesak penghujung Kabinet Kerja bertugas. Undang-undang KPK tersebut dengan jelas membatasi ruang gerak KPK dan dominasi pejabat pemerintahan yang diisi oleh polisi. Pada Kabinet Indonesia Maju, terdapat 9 polisi yang menjabat di pemerintahan. Irjen Firli Bahuri dipilih menjadi ketua KPK memosisikan lembaga tersebut tidak independen.

Fakta menurut Linda Hutcheon merupakan pemaknaan terhadap peristiwa sebagai kesadaran-diri baru dengan adanya perbedaan antara masa lalu dan fakta historis yang dikonstruksi. Dengan kata lain, fakta merupakan pandangan berbagai kesadaran-diri yang memiliki pemaknaan berbeda meski berasal dari peristiwa yang sama. Rumusan fiksi posmodernisme yang demikian merupakan penyaringan fakta dan penafsiran dokumen. Fakta dalam fiksi posmodernis bukan sebagai masa lalu yang "sesuatu" sebagai representasi

yang diobjektifikasi netral. Secara proyektif, daur-ulang penyaringan sudut pandangan sesuai kepentingan "masa kini" (2004:88-89).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada sub bab sebelumnya, disimpulkan sebagai berikut. Pertama, cerpen *Tujuh Puluhan* dibangun berdasarkan representasi fakta sejarah Orde Baru dan dikembangkan melalui proses imajinatif. Fakta sejarah tersebut merupakan representasi peristiwa pada Orde Baru yang dinarasikan dalam bentuk karya sastra yang fiktif. Kedua, penyimpangan fakta sejarah merupakan parodisasi tokoh pedagang buah dan petugas keamanan yang menjadi narasi pusat untuk menyembunyikan gagasan pengarang berupa kritik sosial. Kritik tersebut disampaikan dengan menyimpangkan tokoh yang diintrogasi. Tokoh tersebut seharusnya adalah demonstran dari mahasiswa. Akan tetapi, pengarang menyimpangkannya dengan memosisikan tokoh pedagang sebagai pelaku demonstran yang diintrogasi. Ketiga, cerpen *Tujuh Puluhan* mengaitkan peristiwa-peristiwa Orde Baru dengan Kabinet Kerja di ujung kekuasaannya sebagai bentuk kontekstualisasi cerpen diterbitkan. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain, pelemahan KPK, keberpihakan pemodal asing, dan dominasi penguasa oleh aparat yang menjabat di pemerintahan pada masa transisi Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju oleh presiden yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. (1984). "Sastra dan Sejarah: Pantulan Historis dan Novel", Majalah *Horison* (XVIII/502-508) No. 6 Juli.
- Hutchoen, Linda. (2004). *Politik Posmodernisme*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Ipong, Jazimah. (2013). "Malari: Studi Gerakan Mahasiswa Orde Baru" *Jurnal Agastya*. 3(1), 9-34.
- Padiatra, Aditia Muara. (2015). "Introduction to Malari: Dari Situasi, Aksi, hingga Rusuh pada Awal Orde Baru 1970-1974" *Jurnal Criksetra*. 4(8), 103 – 119.
- Ratna, Nyoman Kutha. (2004). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supersemar: Sejarah dalam Balutan Kekuasaan. *Bernas Jogja*. (4, Maret 2014).
- Supriyadi. (2016). "POSTMODERNISME LINDA HUTCHEON: Poetics of Postmodernism(1989) dan Politics of Postmodernism(2002)" *Jurnal Poetika*, 4(2), 129-133.
- Tujuh Puluhan. *Kompas*. (13, Oktober 2019).
- Wibawati, Samti Wira, dkk. (2018). "Potensi dan Tantangan One Belt One Road bagi Kepentingan Nasional Indonesia di Bidang Maritim" *Jurnal Kajian Wilayah*. 9(2), 109-123.
- Yunus, Umar. (1984). "Massa Lampau dalam Karya Sastra", Majalah *Horison* (XVIII/509-525) No 6 Juli.
- <https://jateng.tribunnews.com/2019/09/24/link-live-streaming-aksi-demo-di-senayan-hari-ini-selasa-24-september-2019-kompas-tv>. Wahyu Ardianti Woro Seto diakses pada 31 Oktober 2019 pada 11.50 WIB